

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN AHLI HUKUM PADA PERUSAHAAN DAN KAITANNYA DENGAN PEMBATASAN AKSI KORPORASI ¹

Oleh :
Angreini Wiranti Weno ²
Harly Stanly Muaja ³
Frits Marannu Dapu ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan dan pertanggungjawaban ahli hukum dalam perusahaan serta kaitannya dengan pembatasan aksi korporasi. Seiring dengan meningkatnya dinamika dunia usaha, peran legal officer semakin vital dalam memastikan perusahaan mematuhi regulasi dan menghindari potensi risiko hukum. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum positif serta membandingkan praktik yang diterapkan dalam perusahaan-perusahaan besar. Dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum legal officer dan batasan yang harus diperhatikan dalam aksi korporasi. Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, perusahaan menghadapi tantangan hukum yang lebih kompleks, termasuk regulasi yang terus berkembang dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Oleh karena itu, legal officer dituntut untuk tidak hanya memahami hukum yang berlaku tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan regulasi yang dapat berdampak pada kebijakan perusahaan. Peran ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa perusahaan tetap patuh terhadap hukum dan menghindari potensi sanksi hukum. Selain itu, penelitian ini membahas dampak dari ketidakpatuhan dalam aksi korporasi, seperti merger dan akuisisi yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat. Legal officer harus mampu mengidentifikasi risiko hukum yang timbul dari transaksi ini dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari regulator terkait serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, hingga pidana yang merugikan perusahaan. Lebih jauh, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas peran legal officer, termasuk strategi dalam menyusun kebijakan kepatuhan internal, penguatan mekanisme audit hukum, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan strategis. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan hukum dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban hukum, ahli hukum, legal officer, aksi korporasi, hukum perusahaan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha tidak dapat berdiri sendiri, banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada.⁵

Bentuk badan usaha yang paling banyak diminati adalah perseroan terbatas, Perusahaan yang berskala besar tentu sangat selektif dalam menangani masalah yang muncul pada perusahaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut menjadi UU PT) perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101255

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Cetakan Kedua.

Undang-Undang iniserta peraturan pelaksanaannya.⁶ Perseroan juga memiliki banyak divisi di dalam sistem organisasinya, divisi pada umumnya yaitu divisi personalia, divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi pemeliharaan, divisi hubungan masyarakat, dan legal (hukum) division, yang sangat berhubungan atau berkaitan dengan Ilmu Hukum disebut sebagai *Legal Officer*.

Legal officer pada perusahaan yang jumlahnya besar, bisa dibagi jadi beberapa bagian, misalnya legal officernya yang mempunyai tugas mengawasi dokumennya serta perizinannya ataupun legal officernya yang mengawasi permasalahan hukumnya, baik itu masalahnya perdata maupun pidana. Tetapi di perusahaan menengah, legal officernya menangani semua hal, baik itu dokumennya ataupun masalah hukumnya. Aturan mengenai *Legal Officer* hanya diatur dalam peraturan perusahaan (Internal perusahaan), itu semua di dukung oleh keterangan dalam pasal 103 UUP yang menjelaskan bahwa seorang direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih untuk dan atas nama Perseroan melakukan "perbuatan hukum" tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.⁷

Perseroan yang ingin mengembangkan kinerja perusahaannya dapat melakukan beberapa bentuk aksi korporasi. Perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal dapat menawarkan sahamnya kepada publik dengan cara melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan kata lain memesan efek terlebih dahulu. Tujuan Perseroan mengambil kebijakan *corporate action* yang semata-mata untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena *corporate action* selalu berdampak positif bagi kinerja Perseroan. Praktek penyelenggaraan *right issue* dan *without right issue* pada Perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan. *Legal Officer* punya peran yang begitu berarti dalam suatu perseroan terbatas. Legal Officer memperhatikan semua dokumennya, perizinannya, dan masalah hukumnya yang ada dalam perusahaan. Dengan tidak adanya dokumen dan perizinan, perusahaan tak harap akan berjalan. Jika terbentuk masalah hukum, semua perusahaan pasti akan mengalami banyak hambatan. Dalam menjalankan tugasnya *legal officer* juga menjadi penasehat hukum perusahaan, semua masukan

yang diberikan oleh orang pengurus pekerjaan legal officer amat dampaknya dari kepastian Direktornya. Selain itu, *legal officer* juga membuat dokumen-dokumen, Perizinan-perizinan, surat-surat dan langkah hukum yang harus diambil apabila terjadi masalah hukum pada suatu perusahaan⁸

Legal officer memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aksi korporasi di perusahaan. Peran ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara umum yang dimaksud dengan Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan orang-orang yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Dalam hal ini Legal Officer dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja, keamanan, dan nilai perusahaan. Legal Officer ini harus benar-benar orang yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada perusahaan, karena kedudukannya yang strategis ini dapat membuat seorang legal officer memiliki hampir semua informasi tentang perusahaan, sehingga harus hati-hati dalam memilih seorang legal officer. Selain itu dengan kedudukannya yang strategis tersebut legal officer dapat menjadi pemantau yang dapat langsung mendeteksi adanya permasalahan hukum di internal maupun eksternal perusahaan.⁹

Aksi korporasi pada dasarnya adalah bagian dari cara pelaku usaha untuk memperkuat dominasinya dalam mengembangkan kegiatan usaha, Aksi korporasi yang meliputi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hal tersebut merupakan bagian dari upaya korporasi untuk memperkuat jaringan atau membesarkan kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena jika semula terdapat dua atau lebih entitas korporasi dalam bidang usaha tertentu dan kemudian bergabung melalui aksi korporasi, maka mereka akan semakin mudah menguasai pasar dan memperkuat posisinya menjadi lebih unggul di antara para pesaingnya. Selain sebagai trik memaksimalkan keuntungan, aksi korporasi

⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Suarmagita, I. M. Y., Mahendrawati, N. L., & Astiti, I. G. K. S. (2021). Kedudukan Pengemban Jabatan Legal

Officer dalam Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 210-214, hlm 2

⁹ Widodo, W. P. (2019). Kedudukan Legal Officer Ksp. *Roda Sejahtera Dalam Menjamin Aktivitas Perusahaan Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 95-109, hlm 4.

juga dapat menciptakan efisiensi yang mampu menekan biaya produksi suatu perusahaan.¹⁰

Hukum di Indonesia bersifat dinamis, yang artinya perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Tidak hanya pada aspek social-budaya maupun politik, namun juga hukum pada aspek ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan berupaya dengan konsep-konsep dan cara yang baru untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Suatu perusahaan pasti akan melindungi asetnya dari berbagai gangguan, sehingga aktivitas perusahaan senantiasa berjalan dengan optimal.

Tanggung jawab ahli hukum sangat membantu perusahaan dalam menangani masalah hukum. Mereka sangat paham betul dan jeli atas apa yang menjadi masalah yang timbul dan beresiko merugikan perusahaan. Karena peran mereka dapat memberikan akses untuk kelancaran bisnis perseroan terbatas dengan mengamankan investasi dan mengamankan segala aset yang dimiliki oleh perusahaan, mengadakan dokumen-dokumen hukum, mengelola dan mendokumentasikan dokumen-dokumen hukum.

Melakukan pembatasan aksi korporasi merupakan tanggung jawab legal officer, jika melakukan pelanggaran dapat menimbulkan dampak luas yang mencakup aspek hukum, reputasi, finansial, dan internal perusahaan maka sangat diperlukan pertanggung jawaban dari ahli hukum perusahaan dalam melakukan aksi korporasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan dan Pertanggungjawabann ahli hukum dalam perusahaan.
2. Bagaimana Hubungan antara Ahli Hukum pada Perusahaan dan Pembatasan Aksi Korporasi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan yang penulis

lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier apabila diperlukan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Pertanggungjawaban Ahli Hukum dalam Perusahaan

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Salah satu bentuk usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar, jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan memerlukan ahli hukum karena beberapa alasan krusial yang berkaitan dengan kepatuhan, perlindungan, dan pengembangan bisnis. Mengenai perusahaan, ahli hukum yang bertanggung jawab atas kebijakan atau tindakan hukum yang diambil oleh perusahaan adalah *Legal Officer* yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum jika terdapat pelanggaran hukum atau kerugian yang ditimbulkan akibat kebijakan atau keputusan yang mereka ambil. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada ahli hukum tersebut bergantung pada sejauh mana kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum mereka yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau pihak ketiga. Oleh sebab itu, sebuah Perusahaan sudah pasti memerlukan ahli hukum, ahli hukum tersebut ialah *legal officer* (bagian hukum), yang bertugas untuk mengurus perusahaan di bidang hukum, seperti legalitas perusahaan, dokumen perusahaan, melakukan kontrak atau kerja sama dengan pihak lain,

¹⁰ Rachmadi Usman. 2013. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 634.

¹¹ Sentosa Sembiring. 2006. Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan. Bandung: Nuansa Aulia, hlm 12.

membuat kesepakatan atau kontrak, membantu perusahaan untuk meninjau, memproses, memperbaiki kontrak, sertifikat saham, surat perjanjian ataupun berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan legalitas dokumen. Jabatan *legal officer* (bagian hukum) pada suatu perusahaan tidak hanya mengurus masalah internal perusahaan, tetapi juga mengurus masalah eksternal perusahaan. Tugas *legal officer* (bagian hukum) terdiri dari beberapa bagian, yakni bagian yang bertugas menangani dokumen dan perizinan, menangani masalah hukum. *Legal officer* adalah profesional yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola aspek hukum suatu perusahaan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga agar perusahaan tetap berada di jalur hukum yang benar. Dengan semakin kompleksnya dunia bisnis, peran *legal officer* menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa semua aspek operasional perusahaan mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku.¹²

Aturan mengenai *Legal Officer* yang hanya ada diatur dalam peraturan perusahaan (Internal perusahaan), itu semua di dukung oleh keterangan dalam pasal 103 UUP yang menjelaskan bahwa seorang direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih untuk dan atas nama Perseroan melakukan “perbuatan hukum” tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.¹³

Pasal 1365 KUHPdata menjelaskan tentang tanggung jawab, bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Rumusan Pasal 1367 KUHPdata di atas, menunjukkan bahwa dalam KUHPdata dikenal ada 2 (dua) jenis tanggung jawab, yaitu:¹⁴

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan akibat kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
2. Tanggung jawab berdasarkan risiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena

kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungnya, atau dalam pengawasannya.

Kedudukan dan Fungsi ahli hukum perusahaan yakni *Legal Officer* dalam perusahaan, khususnya perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sangat penting, mengingat peran yang dipegang sangatlah besar, karena seperti yang diketahui bahwa setiap perusahaan tidak terlepas dari segala macam masalah, baik yang berasal dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal). Maka dengan demikian maka Legal sangatlah dibutuhkan bagi kelangsungan roda bisnis perusahaan, namun tidak semua di perusahaan dapat menempatkan posisi Legal di perusahaannya, hal ini dikarenakan perusahaan dengan skala kecil maupun sekala menengah, menerapkan system “kerja rangkap” pada posisi kerja Legal tersebut, karena di pengaruhi oleh kebutuhan tenaga kerja Legal yang belum terlalu dibutuhkan maupun faktor efisiensi anggaran. Namun, pada perusahaan dengan skala besar, posisi dan peran dari *Legal Officer* sangatlah dibutuhkan sekali karena tugas dari Legal itu sendiri dalam intern maupun ektern perusahaan, tugas tersebut seperti menangani dokumen perijinan, menangani permasalahan hukum perusahaan seperti permasalahan perdata maupun permasalahan pidana.¹⁵

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang *Legal Officer*, karena Legal Officer diatur dalam peraturan Perusahaan itu sendiri. Peran dari seorang *Legal Officer* bisa dikatakan sebagai tameng perusahaan dari segala perlawanan-perlawanan pihak luar yang membahayakan perusahaan. Seorang legal officer setidaknya memiliki tiga tugas utama yang perlu dilakukan, antara lain.¹⁶

- i. Sebagai Advokat Perusahaan: Mewakili perusahaan jika terjadi masalah di Pengadilan;
- ii. Sebagai Pelaksana Perusahaan: Menyiapkan dan mengurus perizinan serta dokumen lainnya baik untuk internal maupun eksternal perusahaan;
- iii. Sebagai Konsultan Hukum Perusahaan:

¹² Kontrak Hukum. 2024. Mengenal Tugas Legal Officer. <https://kontrakhukum.com/article/mengenal-tugas-legal-officer/> pada tanggal 1 november 2024.

¹³ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁴ Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 21-28, hlm 2.

¹⁵ Putra, C. (2013). Kedudukan Dan Fungsi Legal Officer Dalam Perseroan Terbatas. *Lex Privatum*, 1(4), hlm 4.

¹⁶ Jimmy Joses Sembiring. 2009. *Legal Officer Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen Haki, Ketenagakerjaan, & Masalah Hukum di Perusahaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm 2.

Memberikan nasihat atau saran mengenai hukum kepada pemimpin perusahaan.

Fungsi *legal officer* juga untuk melindungi suatu korporasi agar terhindar dari permasalahan hukum. Oleh sebab itu, keberadaannya sangat penting supaya korporasi tersebut dapat terus berjalan atau beroperasi. Pada perusahaan besar, tugas *legal officer* dapat dibagi menjadi dua, yaitu petugas hukum dan kuasa hukum. Petugas hukum akan menangani dokumen juga perizinan, sementara kuasa hukum bertugas menangani masalah hukum perdata maupun pidana. Tetapi jika perusahaan tersebut skalanya menengah, maka tanggung jawab *legal officer* adalah merangkap dalam menangani seluruh dokumen beserta masalah hukumnya. Oleh sebab itu, syarat menjadi *legal officer* adalah cukup berpengalaman. Salah satunya adalah pernah menjalani magang pada firma hukum ataupun suatu korporasi. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman kerja juga wawasan pada sektor penasihat hukum. Tanggung Jawab *Legal Officer* dalam Suatu Perusahaan yaitu:¹⁷

- i. Memberi Nasihat Hukum, Tugas pertama ini adalah mengarahkan dewan direksi mengenai suatu masalah hukum, potensi risikonya, serta tindakan yang perlu diambil sebagai solusi. Pengarahan ini dapat menggunakan platform lisan maupun tertulis.
- ii. Mengelola Kontrak, Salah satu tugas utama adalah menyusun dan mengkaji kontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. *Legal officer* harus mengevaluasi risiko hukum yang mungkin muncul dari isi kontrak dan menjelaskan terminologi hukum kepada pihak-pihak yang terlibat.
- iii. Mewakili Perusahaan dalam Proses Hukum, Dalam situasi di mana perusahaan menghadapi masalah hukum, *legal officer* dapat mewakili perusahaan dalam mediasi atau litigasi. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pengacara eksternal jika diperlukan
- iv. Mengidentifikasi Risiko Keputusan Perusahaan, Seorang *legal officer* wajib mencegah seluruh masalah hukum perusahaan sebelum menjadi krisis. Oleh sebab itu diperlukan identifikasi risiko keputusan perusahaan oleh *legal officer*,

sehingga tindakan dan keputusan perusahaan dapat dianalisis.

- v. Sosialisasi dan Pengarahan, Tanggung jawab *legal officer* selanjutnya yaitu mengadakan sosialisasi dan pengarahan ketika permasalahan hukum dirasa cukup berat. Penyuluhan ini membahas tentang hal apa saja yang harus dihindari agar reputasi korporasi tetap terjaga.
- vi. Riset Sumber Daya Hukum, Berikutnya adalah melakukan riset sumber daya hukum, dikarenakan peraturan bisa saja berubah kapanpun. Oleh sebab itu, *legal officer* wajib aktif meneliti sumber daya hukumnya. Misalnya tentang undang – undang, pasal, hingga keputusan pengadilan.

Kedudukan *Legal Officer* sangat vital bagi keberlangsungan dan keamanan operasional perusahaan. Dengan tanggung jawab yang meliputi pemberian nasihat hukum, pengelolaan dokumen legal, identifikasi risiko, serta pengurusan perizinan, mereka berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan aspek hukum yang kompleks. Di dalam perusahaan, *legal officer* berkedudukan langsung di bawah Direksi dan Staf ahli Direksi. Dengan posisi ini, mereka bisa lebih mudah berkoordinasi dengan bagian internal perusahaan, seperti akunting, marketing, HRD, dan internal audit. Karena kedudukannya yang strategis, maka segala informasi tentang perusahaan pasti diketahui tim *legal officer*. Direksi atau Direktur adalah suatu organ Perseroan yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab yang penuh terhadap pengurusan dan jalannya Perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan tersebut. Direksi juga mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari Perseroan tersebut.¹⁸

B. Hubungan antara Ahli Hukum pada Perusahaan dan Pembatasan Aksi Korporasi

Pelaksanaan suatu hak dan kewajiban hukum selalu menuntut adanya tanggung jawab hukum. Pelaksanaan setiap wewenang yang dibebankan dalam suatu jabatan selalu menuntut adanya tanggung jawab. Setiap pemangku jabatan memiliki kebebasan bertindak, namun

¹⁷ Penasihat Hukum. 2022. Pengertian dan tanggung jawab *Legal Officer* dalam perusahaan. Diakses dari <https://www.penasihat hukum.com/pengertian-dan-tanggung-jawab-legal-officer-dalam-perusahaan> pada tanggal 01 November 2024

¹⁸ Panjaitan, R. (2020). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan, hlm 7

kebebasannya dibatasi oleh kehendak pemberi wewenang yang telah disepakati dan diwajibkan kepadanya untuk dilaksanakan, dengan kata lain kewajiban para pihak yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian merupakan suatu kausa yang melahirkan tanggung jawab, sebagai suatu kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Demikian dapat diartikan bahwa tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perikatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian. Perusahaan melakukan aksi korporasi dengan alasan-alasan tertentu seperti:¹⁹

1. Memperbaiki struktur modal, Perusahaan dapat melakukan aksi korporasi untuk memperbaiki struktur modal yang biasanya dilakukan melalui right issue. Struktur modal disini artinya adalah berapa banyak perbandingan antara nilai utang dan modal yang dimiliki perusahaan. Tujuannya disini adalah membentuk struktur modal yang sehat bagi perusahaan. Struktur modal yang sehat adalah kondisi dimana jumlah utang dan modal yang ada pada perusahaan berada pada jumlah yang optimal.
2. Memperluas operasi dan menguasai pasar, aksi korporasi seperti stock split atau bonus saham dapat menurunkan harga saham perusahaan dan meningkatkan likuiditasnya, sehingga dapat menarik investor baru dan meningkatkan nilai perusahaan. Biasanya tujuan dari meningkatkan nilai ini adalah untuk memudahkan perusahaan ketika ingin menambah modal lagi. Ketika harga saham cenderung naik, maka akan lebih mudah bagi perusahaan itu untuk menjual sahamnya ke investor baru dibandingkan bila harga sahamnya cenderung stagnan atau menurun.
3. Menambah likuiditas saham, aksi korporasi seperti stock split dan rights issue dapat menambah likuiditas saham perusahaan, sehingga memudahkan investor untuk membeli dan menjual saham tersebut. Semakin mudah pembelian dan penjualan sebuah saham

maka semakin banyak investor yang berpartisipasi dalam perdagangan saham tersebut. Akhirnya likuiditas saham itu juga meningkat. Tingginya likuiditas saham membuat perusahaan semakin mudah untuk melakukan berbagai jenis aksi korporasi.

4. Meningkatkan nilai dividen, Perusahaan dapat memberikan dividen tambahan atau meningkatkan dividen biasa melalui aksi korporasi. Hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara menarik investor yang mencari pendapatan tetap. Biasanya pendapatan tetap dari dividen ini dicari oleh investor dengan modal yang besar, ketika investor membeli saham terkait, maka harga sahamnya pun berpotensi naik.

Beberapa bentuk aksi korporasi yang umum dilakukan oleh Perusahaan:²⁰

1. Dividen: Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, baik dalam bentuk tunai maupun saham tambahan.
2. Stock Split: Pembagian jumlah lembar saham menjadi lebih banyak dengan tujuan meningkatkan likuiditas dan membuat harga saham lebih terjangkau.
3. Rights Issue: Penawaran kepada pemegang saham untuk membeli saham baru dengan harga diskon, biasanya untuk mendapatkan modal tambahan.
4. Merger dan Akuisisi: Penggabungan dua perusahaan atau pengambilalihan satu perusahaan oleh perusahaan lain, bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.
5. Buyback Saham: Perusahaan membeli kembali saham yang beredar di pasar untuk mengurangi jumlah saham dan meningkatkan harga per lembar saham.

Aksi korporasi merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar serta berpengaruh terhadap harga saham di pasar. Secara umum, aksi korporasi merupakan keputusan manajemen perusahaan yang memengaruhi pemegang saham, calon investor atau pemodal, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas keputusan tersebut. Aksi korporasi yang dilakukan perusahaan memiliki tujuan tertentu, misalnya meningkatkan jumlah

¹⁹ Stockbit. 2023. Corporate Action adalah bahan pertimbangan pengambilan keputusan investor, lalu apa definisinya dan contoh nyatanya. Diakses dari <https://snips.stockbit.com/investasi/corporate-action-adalah-bahan-pertimbangan-pengambilan-keputusan->

investor-lalu-apa-definisi-dan-contoh-nyatanya. Pada tanggal 04 November 2024.

²⁰ Nanovest. 2023. Aksi Korporasi (Corporate Action). Diakses dari <https://blog.nanovest.io/kamus/aksi-korporasi-3954/>. Pada tanggal 04 November 2024.

modal inti perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, memperbaiki citra perusahaan, dan lainnya.²¹

Pembatasan aksi korporasi memiliki dampak signifikan terhadap pertanggungjawaban ahli hukum, terutama bagi direksi perusahaan. *Corporate action* atau tindakan korporasi atau yang juga dikenal dengan nama aksi korporasi merupakan sebuah langkah atau tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor (pemegang saham). *Corporate action* adalah peristiwa yang memengaruhi saham suatu perusahaan atau sekuritas lainnya, termasuk distribusi dividen, pemecahan saham, merger dan akuisisi, penawaran hak, dan penawaran bonus.²²

Di Indonesia, ketentuan mengenai notifikasi aksi korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) Diatur lebih mendalam di Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010), Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013). Dalam UU Persaingan Usaha tersebut diatur bahwa perusahaan yang melakukan aksi korporasi dan berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahu kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak aksi korporasi itu dilakukan.²³

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab

risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab hukum perdata dapat diajukan atas dasar, yaitu:²⁴

1. Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut.
2. Adanya wanprestasi yaitu tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal KUHPerdata. Hal lain yang perlu ditegaskan pula bahwa tanggung jawab hukum pemerintah sebagai konsekuensi dari berbagai tindakan yang dilakukan dalam kerangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi lingkup kewenangannya memiliki karakteristik tersendiri yaitu dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya.

Ahli hukum juga berkontribusi dalam penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)/tata kelola perusahaan, yang bertujuan untuk membatasi tindakan korporasi agar tetap transparan, akuntabel adil, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan GCG (*Good Corporate Governance*), perusahaan dapat melindungi kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Hal ini juga mengurangi risiko tindakan ilegal yang dapat mengarah pada pertanggungjawaban hukum bagi pengurus dan perusahaan.²⁵

Ahli hukum perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan setiap aksi korporasi seperti merger, akuisisi, penerbitan saham baru, atau perubahan struktural lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, ahli hukum perusahaan perlu melakukan berbagai langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap pembatasan aksi

²¹ Lubis, M. R. K., Hardianti, R. A., & Darmawan, R. (2022, December). Praktik Manajemen Laba di Sektor Perbankan demi Memenuhi Ketentuan Modal Minimum. *In Prosiding National Seminar*.

²² Andri, Soemitra. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenada Media Kencana, hlm 59

²³ Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan

Pengambilan Saham Perseroan Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁴ M. Yahya Harahap. 2013. Hukum Acara Perdata, Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 448

²⁵ Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

korporasi. Pembatasan aksi korporasi yang diatur oleh berbagai undang-undang berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh direksi dan memastikan semua keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Dalam hal ini, ahli hukum berperan sebagai pengawas yang memastikan setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tidak melanggar ketentuan hukum dan etika bisnis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meskipun kedudukan legal officer dibawah direksi, ahli hukum dalam perusahaan sangat krusial untuk menjaga agar perusahaan beroperasi dengan mematuhi peraturan yang berlaku, menghindari risiko hukum, dan menangani sengketa. Berdasarkan kedudukan yang penting bagi ahli hukum dalam perusahaan maka pertanggungjawaban mereka sebagai Ahli Hukum Perusahaan yakni seorang Legal Officer menjadi penting dalam melindungi kepentingan perusahaan yang dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Ahli hukum terletak pada perannya dalam tata kelola perusahaan dan bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan beroperasi dalam kerangka hukum yang sah.
2. Hubungan antara Ahli Hukum pada Perusahaan dan Pembatasan Aksi Korporasi dikarenakan ahli hukum perusahaan memiliki pemahaman yang dalam tentang hukum dan regulasi yang berlaku. Ahli hukum perusahaan memastikan bahwa setiap aksi korporasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan anti monopoli. Pentingnya dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan perusahaan. Ahli hukum yakni sebagai legal officer berperan sebagai pengawal integritas perusahaan sekaligus bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari aksi korporasi yang dilakukan perusahaan.

B. Saran

1. Peraturan perundang-undangan mengenai eksistensi Legal Officer dalam perusahaan belum ada secara baku, karena hanya terdapat di dalam peraturan perusahaan masing-masing (Intern), perlunya regulasi

peraturan perundang-undangan mengenai tugas dan eksistensi Legal Officer dalam perusahaan, mengingat peran dan kedudukan dari Legal Officer itu sangat penting bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang tidak terlepas dari permasalahan hukum.

2. Legal Officer sebaiknya melakukan audit kepatuhan hukum secara rutin dan memberikan pelatihan hukum bagi seluruh anggota perusahaan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Legal Officer perlu mengidentifikasi dan menilai risiko hukum yang mungkin timbul dalam setiap aksi korporasi, serta memberikan saran tentang cara-cara mitigasi yang efektif demi kebaikan bersama dan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali Mahrus. 2015. *Asas-asas hukum pidana korporasi*. Cet 2. Jakarta: Rajawali pers.
- Basir Saleh & Hendy M Fakhrudin. 2005. *Aksi Korporasi : strategi untuk meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2005. *Analisis investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap M. Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono Sri Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Hartono Sri Redjeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: PT Mandar Maju.
- HS Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartasapoetra G., A.G. Kartasapoetra., Bambang.S, & A. Setiady. 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kelsen Hans. 2008. *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Kotler Philip & Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Ketigabelas. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

- Muhammad Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Murjiyanto R. 2002. *Pengantar Hukum Dagang: Aspek- Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*. Liberty: Yogyakarta.
- Margono Suyad. 2013. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua.
- Nugroho Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama. Kencana: Jakarta.
- Notoatmojo Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Silondae Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas. 2012. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Kencana
- Sjawie Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susanti Ida & Bayu Seto. 2003. *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sembiring Jimmy Joses. 2009. *Legal Officer Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen Haki, Ketenagakerjaan, & Masalah Hukum di Perusahaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sembiring Sentosa. 2006. *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.
- Sudaryat. 2013. *Legal Officer*. Cet 1. Bandung: Oase Media.
- Ugo & Pujiyo. 2011. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Cetakan Kedua. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Azhar, D. P., & Mahyani, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 540-558.
- Basri, A., & Hamsir, H. (2020). *Peran dan Tanggung Jawab Legal Officer*. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 389-400.
- Binus Nusantara. 2020. *Corporate Action, apakah itu?*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/17/corporate-action-apaakah-itu/> pada tanggal 02 November 2024.
- Dalimunthe, N., Azhari, A. K., Wahyudi, I. H., Aziz, M. T., Cintana, A. D., Khairunisah, K., ... & Adila, P. (2023). *Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 83-106.
- Dewi, R. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Jabatam Legal Officer (Bagian Hukum) Dan Pertanggungjawabnya Secara Perdata Pada Perseroan Terbatas (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.
- Djaidi, D. D. A. (2022). *Pertanggungjawaban Hukum Influencer dalam melakukan review produk di media social (Doctoral dissertation, Universitas Panca Marga)*.
- Handayani, I. A., Suartini, S., & Fuad, F. (2023). *Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. *Binamulia Hukum*, 12(2), 393-402.
- Lubis, M. R. K., Hardianti, R. A., & Darmawan, R. (2022, December). *Praktik Manajemen Laba di Sektor Perbankan demi Memenuhi Ketentuan Modal Minimum*. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) (Vol. 2, No. 5)*.
- Nasuha, A. (2012). *Dampak kebijakan spin-off terhadap kinerja bank syariah*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Putra, C. (2013). *Kedudukan Dan Fungsi Legal Officer Dalam Perseroan Terbatas*. *Lex Privatum*, 1(4).
- Panjaitan, R. (2020). *Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan*.
- Rita Dyah Widawati, Tesis: *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan*, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250.

Jurnal

- Anugrah, M. R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Korporasi Pada Tindakan Stock Split Saham Syariah*.

Rodliyah, R., Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem Hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 191-206

Suarmagita, I. M. Y., Mahendrawati, N. L., & Astiti, I. G. K. S. (2021). Kedudukan Pengemban Jabatan Legal Officer dalam Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 210-214.

Subekti, T. (2008). Batasan Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perusahaan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 21-28.

Suwita, A. S. (2019). Pengaturan Aksi Korporasi Reverse Stock Split Di Hukum Pasar Modal Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal.

Widodo, W. P. (2019). Kedudukan Legal Officer Ksp. Roda Sejahtera Dalam Menjamin Aktivitas Perusahaan Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 95-109.

Waskito, P. A. (2022). Tanggung Jawab Hukum Direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *CITA HUKUM INDONESIA*, 1(1), 32-47.

Yessy Kusumadewi, "Pelaksanaan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 79- 92.

Peraturan/Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2023.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Website/Internet

Bareksa. Aksi Korporasi–Pengertian, Arti, dan Definisi. Diakses dari <https://www.bareksa.com/kamus/a/aksi-korporasi>. Pada tanggal 20 september 2024,

Burs & Associates. 2024. Ap itu legal Officer? Diakses dari <https://bursadvocates.com/legal-officer/>. Pada tanggal 06 November 2024.

Cake. 2022. Apa itu Legal Officer: Kenali Tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan! Diakses dari <https://www.cake.me/resources/legal-officer-adalah?locale=id>. Pada tanggal 04 November.

Hukum Online. "tanpa tahun". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perusahaan-ispin-off-i--bagaimana-status-karyawanc13149/>. pada 02 Agustus 2024.

Hukum Online. Syarat menjadi ahli dalam sidang perkara pidana. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-menjadi-ahli-dalam-sidang-perkara-pidana-lt644bbc2895c33/>. pada tanggal 30 oktober 2024.

Hukum Online. 2022. Kedudukan Legal Officer di Perusahaan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-legal-officer-di-perusahaan-lt639842b15bd0b/> pada tanggal 01 November 2024.

Hukum online. 2024. Tanggung Jawab Direksi atas Aksi Korporasi di Perusahaan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-direksi-atas-aksi-korporasi-di-perusahaan-lt66cf622febcd8/> pada tanggal 02 November.

Hukum Online. 2023. Mengenal Manfaat Good Corporate Governance bagi Perusahaan. Diakses dari <https://rcs.hukumonline.com/insights/good-corporate-governance> pada tanggal 03 November 2024.

Hukum Online. 2024. Divisi legal berperan penting dalam menjamin perusahaan "On The Track". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/divisi-legal-berperan-penting-dalam-menjamin-perusahaan-on-the-track-lt66b34a8e36551/> pada tanggal 6 Februari 2024.

Kontrak Hukum. 2024. Mengenal Tugas Legal Officer. Diakses dari

<https://kontrakhukum.com/article/mengenal-tugas-legal-officer/pada tanggal 1 november 2024>.

Kontrak Hukum. 2023. Pentingnya Legal Officer diperusahaan, bisa bantu perizinan!, diakses dari <https://kontrakhukum.com/article/legal-officer/pada tanggal 02 November 2024>.

Kelas Work. 2022. Legal Officer: Pengertian, Tugas, Skills dan Gaji!. Diakses dari <https://kelas.work/blogs/legal-officer:-pengertian,-tugas,-skills-dan-gaji!> Pada tanggal 03 November 2024.

Kamus besar bahasa Indonesia.

Legal Information institute. Diakses dari https://www-law-cornell-edu.translate.goog/wex/jurist?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. pada tanggal 30 Oktober 2024.

Libera. Pentingnya staf legal officer diperusahaan, bisa cegah resiko hukum hingga bantu perizinan. Diakses dari <https://libera.id/blogs/pentingnya-staf-legal-officer/#:~:text=Tugas%20Legal%20Officer,legal%20officer%20di%20dalam%20perusahaan>. Pada tanggal 04 November 2024.

Myrobin. 2023. Job deskripsi, Kode Etik, dan kisaran gaji. Diakses dari <https://myrobin.id/untuk-pekerja/legal-officer/>. Pada tanggal 05 November 2024.

Nanovest. 2023. Aksi Korporasi (Corporate Action). Diakses dari <https://blog.nanovest.io/kamus/aksi-korporasi-3954/>. Pada tanggal 04 November 2024.

Penasihat Hukum. 2022. Pengertian dan tanggung jawab Legal Officer dalam perusahaan. Diakses dari <https://www.penasihathukum.com/pengertian-dan-tanggung-jawab-legal-officer-dalam-perusahaan> pada tanggal 01 November 2024.

Stockbit. 2023. Corporate Action adalah bahan pertimbangan pengambilan keputusan investor, lalu apa definisinya dan contoh nyatanya. Diakses dari <https://snips.stockbit.com/investasi/corporate-action-adalah-bahan-pertimbangan-pengambilan-keputusan-investor-lalu-apa-definisi-dan-contoh-nyatanya>. Pada tanggal 04 November 2024.

Wikikamus. Diakses dari https://id.wiktionary.org/wiki/ahli_hukum pada tanggal 30 Oktober 2024.